

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan Basis Kas untuk Pendapatan LRA dan Belanja.

- a. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan dan sumber Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, di sisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan menggunakan basis kas yang mengakui semua transaksi ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

a. Pendapatan

Pendapatan daerah-LRA adalah semua penerimaan pada Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Target pendapatan merupakan batas minimal jumlah

pendapatan yang dianggarkan harus diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran tertentu. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA meliputi pendapatan Pajak Daerah-LRA, Retribusi Daerah-LRA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA;
2. Pendapatan Transfer-LRA yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari DBH, DAU, DAK, Dana Desa-LRA, dan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA yang meliputi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pendapatan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp634.152.870.136,48 dan terealisasi senilai Rp645.179.353.993,73 atau mencapai 101,74%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp24.771.834.928,51 atau 3,70% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp669.951.188.922,24 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 15
Rincian Pendapatan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah	73.090.587.048,73	52.073.310.252,24	21.017.276.796,49
2	Pendapatan Transfer	563.803.319.346,00	610.185.349.767,00	(46.382.030.421,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.285.447.599,00	7.692.528.903,00	592.918.696,00
Jumlah		645.179.353.993,73	669.951.188.922,24	(24.771.834.928,51)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LRA

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp65.241.936.620,00 dan terealisasi senilai Rp73.090.587.048,73 atau mencapai 112,03%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp21.017.276.796,49 atau 40,36% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp52.073.310.252,24 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 16
Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan hasil Pajak Daerah – LRA	23.965.016.835,00	26.153.179.463,00	109,13	12.064.921.118,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	36.898.921.187,00	39.359.684.325,00	106,67	14.041.286.339,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.980.000.000,00	1.162.498.116,00	58,71	729.061.014,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	2.397.998.598,00	6.415.225.144,73	267,52	25.238.041.781,24
Jumlah		65.241.936.620,00	73.090.587.048,73	112,03	52.073.310.252,24

a) Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp23.965.016.835,00 dan terealisasi senilai Rp26.153.179.463,00 atau mencapai 109,13% mengalami kenaikan senilai Rp14.088.258.345,00 atau 116,77% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp12.064.921.118,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 17
Rincian Pendapatan Pajak – LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Hotel	148.500.000,00	27.143.500,00	18,28	32.673.000,00
Pajak Restoran	1.100.000.000,00	1.030.761.567,00	93,71	1.006.742.551,00
Pajak Hiburan	0,00	2.200.000,00	0,00	500.000,00
Pajak Reklame	500.000.000,00	503.133.986,00	100,63	302.845.126,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	6.225.662.570,00
Pajak Air Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	658.011.971,00	94,00	658.879.733,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.697.000.000,00	3.434.749.355,00	73,13	3.175.091.213,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.064.831.898,00	214.761.375,00	20,17	659.526.925,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.200.000.000,00	6.202.638.409,00	119,28	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.269.399.019,00	6.343.939.900,00	120,39	0,00
Opsen bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.282.285.918,00	7.732.639.400,00	146,39	0,00
Jumlah	23.965.016.835,00	26.153.179.463,00	109,13	12.064.921.118,00

Pada tabel 7.17 diatas terdapat penurunan yang sangat signifikan pada realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dimana pada Tahun 2024 terealisasi senilai Rp6.225.662.570,00, sedangkan pada Tahun 2025 belum terdapat realisasi atau tercatat senilai Rp0,00. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan mekanisme atau perubahan nomenklatur ketentuan pajak daerah terbaru. Selanjutnya, terdapat selisih yang cukup signifikan antara anggaran dan realisasi pada Pajak Hotel senilai 18,28%. Rendahnya realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh masih terbatasnya tingkat hunian hotel dan aktivitas jasa penginapan yang belum sepenuhnya pulih atau berkembang sesuai target yang ditetapkan. Karakteristik daerah yang belum memiliki tingkat kunjungan wisata maupun aktivitas perjalanan dinas yang tinggi turut mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Selain itu, kepatuhan wajib pajak hotel dalam pelaporan dan pembayaran pajak juga masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Pada komponen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdapat selisih antara anggaran dan realisasi senilai 20,17%. Rendahnya realisasi BPHTB dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan di masyarakat dibandingkan dengan proyeksi awal anggaran. Selain itu, nilai transaksi objek pajak yang cenderung lebih rendah, proses administrasi peralihan hak yang belum seluruhnya terselesaikan pada tahun berjalan, serta kondisi perekonomian masyarakat yang mempengaruhi minat investasi dan transaksi properti turut berdampak terhadap capaian realisasi BPHTB di Kabupaten Mamuju Tengah.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penetapan target pendapatan agar lebih realistis sesuai potensi riil daerah, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemungutan pajak, serta memperkuat pengawasan dan optimalisasi kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan realisasi pendapatan daerah pada tahun berikutnya.

b) Pendapatan Retribusi Daerah -LRA

Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp36.898.921.187,00 dan terealisasi senilai Rp39.359.684.325,00 atau mencapai 106,67%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp25.318.397.986,00 atau 180,31% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp14.041.286.339,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 18
Rincian Retribusi Daerah

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	27.747.632.937,00	32.469.653.121,00	117,02	7.169.986.069,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	221.640.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	190.000.000,00	100.000.000,00	52,63	187.700.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan	256.800.000,00	202.115.000,00	78,71	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.524.488.250,00	6.027.688.000,00	80,11	5.818.791.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	160.000.000,00	142.000.000,00	88,75	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	75.060.000,00	0,00	41.105.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	343.168.204,00	34,32	469.814.270,00
Jumlah	36.898.921.187,00	39.359.684.325,00	106,67	14.041.286.339,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp7.169.986.069,00 mengalami peningkatan signifikan pada Tahun Anggaran 2025 menjadi 32.469.653.121,00. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Reklasifikasi Pendapatan BLUD

Pendapatan layanan kesehatan yang sebelumnya dicatat pada akun Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan BLUD pada tahun 2024, pada tahun 2025 dicatat sebagai bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai penyesuaian nomenklatur dan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.

2. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pemerintah Daerah melakukan peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan, optimalisasi penagihan, serta peningkatan cakupan layanan pada fasilitas kesehatan daerah sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan retribusi.

3. Peningkatan Aktivitas dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan

Bertambahnya jumlah kunjungan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan daerah, termasuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan layanan penunjang lainnya, turut meningkatkan realisasi pendapatan retribusi kesehatan.

Dengan kondisi tersebut, kenaikan signifikan pada akun Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 pada dasarnya merupakan dampak kombinasi antara perubahan klasifikasi akun pendapatan dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.980.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.162.498.116,00 atau 58,71%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp817.501.884,00 atau 112,13% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp729.061.014,00. Ini merupakan Pembagian laba bagi Pemerintah daerah dari Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulselbar.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.397.998.598,00 dan terealisasi senilai Rp6.415.225.144,73 atau mencapai 267,52%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp18.821.697.236,51 atau 74,58% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.238.041.781,24 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 19
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	350.000.000,00	819.410.000,00	234,12	230.337.498,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	173.000.000,00	44.865.000,00	25,93	57.025.000,00
Jasa Giro	700.000.000,00	1.124.482.266,00	160,64	1.197.050.360,00
Pendapatan Bunga	0,00	221.797.197,00	0,00	6.798.593,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	409.398.100,00	3.193.667.113,45	780,09	2.340.745.761,96
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	59.529.871,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	20.027.748.456,86
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	765.600.498,00	951.473.697,28	124,28	1.378.336.111,42
Jumlah	2.397.998.598,00	6.415.225.144,73	267,52	25.238.041.781,24

Pada Tahun Anggaran 2024, akun Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan BLUD terealisasi senilai Rp20.027.748.456,86, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp0,00. Perubahan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian klasifikasi penganggaran dan pencatatan pendapatan sektor kesehatan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan nomenklatur akun terbaru. Pendapatan yang sebelumnya dicatat pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan BLUD pada tahun 2025 dialihkan dan dicatat ke dalam kelompok Retribusi Daerah, khususnya pada objek Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dengan demikian, nihilnya saldo Pendapatan BLUD pada tahun 2025 bukan disebabkan oleh tidak adanya penerimaan layanan BLUD, melainkan karena perubahan mekanisme penganggaran dan reklasifikasi akun pendapatan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah mekanisme bantuan dari Pemerintah untuk menutupi keterbatasan sumber dana. Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat berupa penerimaan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya yang merupakan dana penyesuaian.

Pendapatan Transfer dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp560.571.750.605,48 dan teralisasi senilai Rp563.803.319.346,00 atau mencapai 100,58%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp46.382.030.421,00 atau 7,60% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp610.185.349.767,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 20
Rincian Pendapatan Transfer

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA	492.500.611.000,00	496.859.458.284,00	100,89	532.310.045.129,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	50.807.179.000,00	47.980.745.620,00	94,44	51.461.215.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	17.263.960.605,48	18.963.115.442,00	109,84	26.414.089.638,00
Jumlah	560.571.750.605,48	563.803.319.346,00	100,58	610.185.349.767,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 senilai Rp563.803.319.346,00 terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp492.500.611.000,00 dan terealisasi senilai Rp496.859.458.284,00 atau mencapai 100,89%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp35.450.586.845,00 atau 6,66% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp532.310.045.129,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 21
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	7.604.575.000,00	7.575.226.600,00	99,61	12.479.058.000,00
DAU	361.774.134.000,00	368.877.743.984,00	101,96	369.183.892.749,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	32.185.425.000,00	32.134.009.341,00	99,84	82.048.913.591,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	90.936.477.000,00	88.272.478.359,00	97,07	68.598.180.789,00
Jumlah	492.500.611.000,00	496.859.458.284,00	100,89	532.310.045.129,00

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp7.604.575.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.575.226.600,00 atau mencapai 99,61%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.903.831.400,00 atau 39,30% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp12.479.058.000,00 dikarenakan adanya pengurangan transfer DBH Sawit.

2) Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Alokasi Umum dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp361.774.134.000,00 dan terealisasi senilai Rp368.877.743.984,00 atau mencapai 101,96%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp306.148.765,00 atau 0,08% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp369.183.892.749,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp299.616.375.000,00 dan terealisasi senilai Rp307.875.671.000,00 atau 102,76%.
- (b) Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp5.227.060.000,00 dan terealisasi senilai Rp4.071.373.984 atau 77,89%.
- (c) Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp33.833.611.000,00 dan terealisasi senilai Rp33.833.611.000,00 atau 100,00%.
- (d) Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp23.097.088.000,00 dan terealisasi senilai Rp23.097.088.000,00 atau 100,00%.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp32.185.425.000,00 dan terealisasi senilai Rp32.134.009.341,00 atau mencapai 99,84%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp49.914.904.250,00 atau 60,84% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp82.048.913.591,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- (a) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp349.970.000,00 dan terealisasi senilai Rp349.758.336,00 atau 99,94%.
- (b) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp241.716.000,00 dan terealisasi senilai Rp238.845.825,00 atau 98,81%.
- (c) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp5.273.805.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.256.556.300,00 atau 99,67%.
- (d) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp3.578.375.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.578.375.000,00 atau 100,00%.
- (e) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp22.741.559.000,00 dan terealisasi senilai Rp22.710.473.880,00 atau 99,86%.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp90.936.477.000,00 dan terealisasi senilai Rp88.272.478.359,00 atau mencapai 97,07%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp19.674.297.570,00 atau 28,68% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp68.598.180.789,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- (a) DAK Non Fisik-BOS Reguler dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp18.578.465.000,00 dan terealisasi senilai Rp18.565.799.600,00 atau 99,93%.
- (b) DAK Non Fisik-BOS Kinerja dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp1.112.250.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.112.250.000,00 atau 100,00%.
- (c) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp2.985.100.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.985.100.000,00 atau 100,00%.
- (d) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp8.247.714.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.927.725.538,00 atau 96,12%.
- (e) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp193.185.000,00 dan terealisasi senilai Rp193.185.000,00 atau 100,00%.

- (f) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp2.549.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.522.130.600,00 atau 98,95%.
- (g) DAK Non Fisik-Dana ketahanan Pangan dan Pertanian dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp149.112.000,00 dan terealisasi senilai Rp149.112.000,00 atau 100,00%.
- (h) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Paud Reguler dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp2.704.420.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.704.420.000,00 atau 100,00%.
- (i) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Paud Kinerja dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp15.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp15.000.000,00 atau 100,00%.
- (j) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp90.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp90.000.000,00 atau 100,00%.
- (k) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp7.534.697.000,00 dan terealisasi senilai Rp6.067.514.821,00 atau 80,53%.
- (l) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp44.141.591.000,00 dan terealisasi senilai Rp43.721.462.000,00 atau 99,05%.
- (m) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp927.750.000,00 dan terealisasi senilai Rp358.000.000,00 atau 38,59%.
- (n) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Khusus Guru dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp1.708.193.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.860.778.800,00 atau 108,93%.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp50.807.179.000,00 dan terealisasi senilai Rp 47.980.745.620,00 atau mencapai 94,44%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.480.469.380,00 atau 6,76% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp51.461.215.000,00. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 22
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Dana Desa – LRA	50.807.179.000,00	47.980.745.620,00	94,44	51.461.215.000,00
Jumlah	50.807.179.000,00	47.980.745.620,00	94,44	51.461.215.000,00

1) Dana Desa

Dana Desa dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp50.807.179.000,00 dan terealisasi senilai Rp47.980.745.620,00 atau mencapai 94,44%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.480.469.380,00 atau 6,76% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp51.461.215.000,00.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 terdapat pengurangan Dana Desa senilai Rp2.826.433.380,00 untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

c) **Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA**

1) **Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp17.263.960.605,48 dan terealisasi senilai Rp18.963.115.442,00 atau mencapai 109,84%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp7.450.974.196,00 atau 28,21% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp26.414.089.638,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 23
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	1.773.607.256,00	0,00	3.754.610.082,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	1.629.713.687,00	0,00	5.352.561.968,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.947.292.207,33	6.460.148.495,00	81,29	8.357.499.019,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.287.702,15	18.084.393,00	74,46	17.334.878,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.292.380.696,00	9.081.561.611,00	97,73	8.932.083.691,00
Jumlah	17.263.960.605,48	18.963.115.442,00	109,84	26.414.089.638,00

3. **Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp8.339.182.911,00 dan terealisasi senilai Rp8.285.447.599,00 atau mencapai 99,36%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp592.918.696,00 atau 7,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp7.692.528.903,00 dengan rincian tabel berikut:

Tabel 7. 24
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP BLUD - LRA	8.339.182.911,00	8.285.447.599,00	99,36	7.692.528.903,00
Jumlah	8.339.182.911,00	8.285.447.599,00	99,36	7.692.528.903,00

b. **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp644.027.253.010,48 dan terealisasi senilai Rp622.607.889.371,46 atau mencapai 96,67%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp74.850.670.128,45 atau 10,73% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp697.458.559.499,91 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 25
Rincian Belanja Daerah

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	463.584.292.839,12	452.824.266.108,46	97,68	469.025.200.983,91
Belanja Modal	91.931.171.371,36	84.297.149.410,00	91,69	139.134.589.716,00
Belanja Tidak Terduga	895.000.000,00	696.208.433,00	77,79	475.105.500,00